



**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BREBES  
NOMOR 11/PDT.G/2019/PN.BBS**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**GUMELAR CAHYO PURNOMO  
NPM. 5117500196**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BREBES  
NOMOR 11/PDT.G/2019/PN.BBS

**Gumelar Cahyo Purnomo**

NPM. 5117500196

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



**Dr. H. Nuridin, S.H., M.H**  
NIDN 0610116002

Tegal, Oktober 2019

Pembimbing II



**Dr. H. Sanusi, S.H., M.H**  
NIDN 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag**  
NIDN. 0615067604

## HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BREBES  
NOMOR 11/PDT.G/2019/PN.BBS

**Gumelar Cahyo Purnomo**

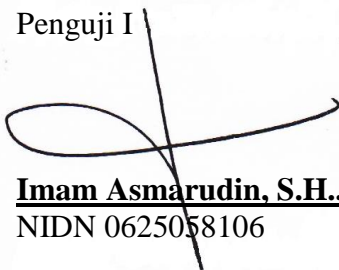
NPM. 5117500196

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Oktober 2019

Penguji II

Penguji I

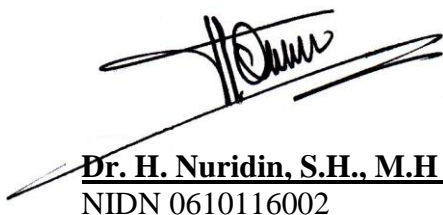


**Imam Asmarudin, S.H., M.H**  
NIDN 0625058106



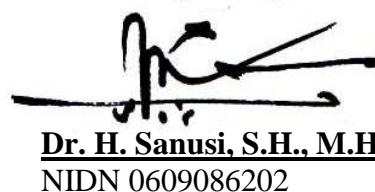
**Kanti Rahayu, S.H., M.H**  
NIDN 0620108203

Pembimbing I



**Dr. H. Nuridin, S.H., M.H**  
NIDN 0610116002

Pembimbing II



**Dr. H. Sanusi, S.H., M.H**  
NIDN 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag**  
NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gumelar Cahyo Purnomo  
NPM : 5117500196  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes 15 Juli 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penyelesaian  
Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Brebes Nomor  
11/Pdt.G/ 2019/PN Bbs

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Gumelar Cahyo Purnomo

## ABSTRAK

**Purnomo, Gumelar Cahyo, Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bbs.** Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Putusan hakim bersifat mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan hakim. Putusan tersebut harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan serta seorang hakim tidak dibenarkan untuk memutus kembali perkara yang sama mengenai pokok sengketa yang sama.

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) mengkaji penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs, 2) mengetahui mengetahui dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs mengacu pada peraturan undang-undang, berdasarkan hasil penelitian maka dapat diuraikan bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara tersebut sudah benar diterapkan, yaitu didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdata. Namun dalam perkara ini, ada hal yang menjadi poin penting dalam hal pengajuan tergugat, yang pada awalnya terdapat 2 (dua) tergugat, dan pada perkara selanjutnya hanya terdapat 1 (satu) tergugat, tergugat dalam pengajuan gugatan kedua pada hakikatnya sama yaitu sama-sama ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono; 2) Dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada putusan nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs yaitu Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/ 1973. Jadi *nebis in idem* menurut penulis dapat dimaknai sebagai suatu esensi pokok perkara, dimana melibatkan para pihak yang sama dengan objek sengketa yang sama yang ternyata telah diberi status hukum lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tidak dapat digugat ulang dalam register perkara terpisah guna menghindari tumpang tindih antar putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dalam praktik peradilan yang baik dan sehat.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** Penerapan, *Nebis in Idem* dan Perkara Perdata.

## ABSTRACT

**Purnomo, Gumelar Cahyo**, Application of the Nebis In Idem Principle in the Settlement of Civil Cases in Brebes District Court Number 11 / Pdt.G / 2019 / PN Bbs. Thesis. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2019.

Judges' decisions are binding on the parties to the dispute and those involved in the dispute, the parties must also submit to and respect the decisions that the judge has handed down. The decision must be considered correct and it is not possible to prove the opponent and a judge is not justified to decide again the same case regarding the same subject matter.

The purpose of this study is to: 1) examine the application of the principle of nebis in idem in the settlement of civil cases Decision Number 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs, 2) know the judge's legal basis in establishing the principle of nebis in idem in its decision on Decision Number 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs. This type of research is library research with normative juridical approach. The data source of this research is secondary data with data collection methods using literature studies and document studies. Analysis of research data using qualitative normative analysis. The results of the study obtained a conclusion that: 1) The application of the principle of nebis in idem in the settlement of civil cases Decision Number 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs refers to the rule of law, based on the results of the study it can be described that the application of the principle of nebis in idem in the case it has been properly implemented, which is based on Article 1917 of the Civil Code. But in this case, there are things that become important points in the filing of the defendant, which initially contained 2 (two) defendants, and in subsequent cases there were only 1 (one) defendant, the defendant in filing the second claim is essentially the same, namely both heir Soedarmo Bin Soemarsono; 2) The legal basis of the judge in establishing the principle of nebis in idem in his decision on the decision number 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs, namely Article 1917 Civil Code and the Supreme Court's Decision Number 647 K/Sip/1973. So nebis in idem according to the author can be interpreted as an essential essence of the case, which involves the same parties with the same object of dispute which turned out to have been given legal status through a court decision that has a permanent power (*inkracht van gewijsde*), then it cannot be re-sued in a separate case register to avoid the overlap between decisions that can cause uncertainty that may reduce the people's trust in their government in good and sound judicial practices. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

**Keywords:** Implementation, Nebis in Idem and Civil Cases.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang, yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Rekan-rekan yang mendukung dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- Almamater UPS Tegal.

## MOTTO

Bersikap adillah sejak dalam pikiran. Jangan menjadi hakim bila kau belum tahu duduk perkara yang sebenarnya. Jangan ikut-ikutan jadi hakim tentang perkara yang tidak diketahui benar-tidaknya.

*(Pramoedya Ananta Toer - Penulis dari Indonesia 1925-2006)*

Sebelum bekerja, hakim di Indonesia mungkin perlu mencoba palu keadilannya di rumah masing-masing.

*(Jerrinx - Personel band Superman Is Dead)*

Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat.

*(Hunert Humphrey - Politikus dari Amerika Serikat 1911-1978)*

Dalam pengadilan di Indonesia, kadang kita harus memilih alternatif yang terbaik di antara yang terkutuk, dengan menyisakan sedikit harapan bahwa hati nurani manusia tidak semuanya terdiri atas buku.

*(Emha Ainun Nadjib - Seorang Seniman, Budayawan, Penyair, serta Intelektual)*



## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami banyak hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga hambatan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum, selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum IPS Tegal.
3. Bapak Dr. H. Nuridin, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas membimbing dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dengan sabar kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan penulis.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, Oktober 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan tentang Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	19
1. Pengertian <i>Nebis In Idem</i> .....	19
2. Syarat Berlakunya <i>Nebis In Idem</i> dalam Perkara Perdata .....	22
3. Pengaturan <i>Nebis In Idem</i> secara Umum dalam Hukum Indonesia .....	23
4. Penerapan <i>Nebis In Idem</i> dalam Penyelesaian Sengketa Perdata .....	25
B. Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata .....	30
1. Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri .....	30
2. Tahap-Tahap Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri .....	33

C. Tinjauan tentang Putusan Hakim .....	39
1. Pengertian Putusan Hakim .....	39
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	43
D. Hakim dan Yurisprudensi .....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Penerapan Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Penyelesaian Perkara Perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs .....	55
B. Dasar Hukum Hakim dalam Menerapkan Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Putusannya pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs .....	62
BAB IV PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sudah dikodratkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia dalam kehidupan bernegara sebagai warga masyarakat selalu melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Binswanger, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengada, suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia.<sup>1</sup> Pada dasarnya manusia itu bersifat ingin didahulukan kepentingannya, senantiasa berusaha memperbesar serta mengemukakan kepentingan-kepentingan sesama manusia lainnya. Masing-masing selamanya selalu berusaha, supaya kebutuhan-kebutuhannya dapat dipenuhi sebanyak-banyaknya. Inilah masalah manusia yang antara lain menuntut perwasitan melalui hukum.<sup>2</sup>

Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan *corporatie* atau *corporatie* dengan *corporatie*, antara manusia dan atau *coorporatie* dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, dimana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Peraturan hukum mengatur hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut.

---

<sup>1</sup> Takwin, Bagus, *Psikologi Naratif Membaca Manusia Sebagai Kisah*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007, hlm. 4.

<sup>2</sup> Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 11.

Masyarakat Indonesia yang serba majemuk seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tidaklah sama, karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya, kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak yang beretika tidak baik sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum tidak selamanya berakhir baik, terkadang hubungan perbuatan hukum berakhir dengan konflik atau sengketa dan berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata.<sup>4</sup>

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana dalam beracara atau tata cara proses pemeriksaan di Pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata (hukum perdata materiil).<sup>5</sup> Tujuan dari hukum acara perdata yaitu agar masyarakat bisa mempertahankan hak keperdataannya, dan juga agar penyelesaian sengketa perkara

---

<sup>3</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

<sup>4</sup> Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 1.

<sup>5</sup> Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2009, hlm. 2.

perdata atau pemulihan hak perdatanya tidak dengan cara main hakim sendiri. Akan tetapi harus menurut ketentuan hukum perdata formil sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menajmin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta mamutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>6</sup>

Suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin bahwa apa yang dituntut adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan yang diajukan. Mengajukan gugatan menjadi suatu cara untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita seseorang melalui putusan pengadilan serta bertujuan memberikan perlindungan oleh pengadilan untuk mencegah pihak menjadi hakim bagi dirinya sendiri.

Tujuan proses peradilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Adanya putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara suka rela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara

---

<sup>6</sup> Asikin, Zainal, *Op Cit*, hlm. 1.

(dengan kekuatan hukum/*inkracht van gewijsde*).<sup>7</sup> Hukum acara perdata pada dasarnya tidak membebani hak dan kewajiban bagi para pihak, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan. Adanya hukum acara perdata diharapkan para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan pihak lain melalui pengadilan dan tidak menjadi hakim bagi dirinya sendiri.

Suatu sengketa para pihak dapat diselesaikan secara damai atau melalui permusyawarahan, namun apabila jalan tersebut tidak dapat ditempuh maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah minta penyelesaian melalui pengadilan. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Pasal 119 HIR atau 143 RBg menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memberikan jalan kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan hakim memeriksanya.

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, agar para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan para pihak.<sup>8</sup> Tugas hakim dalam suatu proses perdata untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Acara perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 2003, hlm, 124.

<sup>8</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 820.

benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.<sup>9</sup>

Hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun dalam pemeriksaan sengketa. Di dalam persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah Putusan, maka putusan hakim diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Putusan hakim yang telah dijatuhkan diharapkan memberi manfaat bagi para pihak yang bersangkutan serta sebagai dasar kepastian hukum para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.<sup>10</sup>

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang

---

<sup>9</sup> Asikin, Zainal, *Op Cit*, hlm. 100.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 103.



bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Oleh sebab itu, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didukung oleh alat-alat bukti formil. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.<sup>11</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara secara seksama meneliti kejadian yang terungkap di persidangan. Kadang kala apa yang tertulis dalam gugatan dan apa yang diterangkan oleh para saksi tidak mampu mengungkap jalinan peristiwa yang ingin diungkap. Namun kadang hakim mampu menangkap fakta atau peristiwa atas dasar apa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian sehingga merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan.<sup>12</sup>

Putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa itu, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan hakim. Apapun yang telah diputuskan hakim, putusan tersebut harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan serta seorang hakim tidak dibenarkan untuk memutus kembali perkara yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Pasal 1917 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.” Pasal tersebut merupakan dasar hukum asas *nebis in idem* dalam perkara perdata. Terhadap suatu perkara perdata yang telah diputus maka terhadapnya berlaku kekuatan mutlak putusan hakim.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 111.

Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Uraian tersebut dapat dilihat mengenai asas *nebis in idem*, dimana asas ini terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini baik dalam arti positif maupun negatif.

Adanya asas *nebis in idem* juga sering digunakan tergugat untuk dijadikan dalil eksepsinya dengan tujuan agar hakim menyatakan gugatan yang diajukan penggugat mengandung unsur *nebis in idem* sehingga gugatan tersebut ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Seperti yang terjadi pada kasus perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs, pokok perkara tersebut berawal pada tanggal 14 Pebruari 1992 Soedarmo bin Soemarsono pernah membuat Akta Pernyataan di hadapan Notaris Fajjah Rianasari Wiratmoko, SH dengan Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 14 Pebruari 1992 Perihal atas nama dan yang mewakili Primkopti Kab. Brebes. Soedarmo bin Soemarsono mewakili Primkopti Kab. Brebes dan pernah membeli 2 (dua) bidang tanah/bangunan yakni: 1 (satu) bidang tanah terletak di Blok Kembang Baru Brebes dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2084, diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 575 tanggal 14 Juli 1981 luas 160 M<sup>2</sup> dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Ds. Pesantunan, Kec. Wanasari, Kab. Brebes dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 136 dan telah diubah menjadi Sertipikat HGB Nomor 22 diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 401 tanggal 1 Agustus 1981 dengan luas 1170 M<sup>2</sup>.

Dua bidang tanah/bangunan dan dua sertipikat yang dibeli tersebut di atas adalah milik Primkopti dan bukan milik atau harta waris dari tuan Soedarmo bin Soemarsono karena uang yang untuk membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut seluruhnya adalah uang dari Primkopti Kabupaten Brebes dan bukan uang dari tuan Soedarmo bin Soemarsono. Sekalipun dalam dua setipikat tersebut di atas menggunakan atas nama tuan Soedarmo bin Soemarsono tetapi ia siap untuk membaliknamakan menjadi atas nama Primkopti Kabupaten Brebes.

Atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban yang salah satunya eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem* (*Exceptio Res Judicata*). Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* apabila dicermati dari materi/obyek sengketa, posita maupun petitumnya sama dengan perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Bbs, tanggal 08 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena perkara *a quo* adalah sama dan sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum tidak dapat lagi diajukan gugatan baru.

Putusan hakim bersifat mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Tidak semua putusan pengadilan mengandung *nebis in idem*, putusan pengadilan yang mengandung asas *nebis in idem* adalah putusan positif sedangkan putusan yang bersifat negatif tidak melekat asas *nebis in idem*. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam penerapan asas *nebis in idem* dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, agar pembahasan masalah lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs?
2. Apa dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, dan sebagai salah satu referensi

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *ne bis in idem* sebagai rujukan dalam penelitian sejenis selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Advokat, sebagai informasi penting yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* agar lebih memahami penerapan asas *nebis in idem* sesuai dengan esensinya, sehingga tidak ceroboh mengajukan eksepsi yang sesungguhnya bukan merupakan *nebis in idem*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pertimbangan sebagai acuan pertimbangan pengambilan keputusan hakim di pengadilan dan membantu pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menganalisis putusan yang berkaitan dengan berlakunya asas-asas hukum.

## E. Tinjauan Pustaka

Muhammad Yusuf Ibrahim (2014) *Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda*. Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XII, Nomor 1, Mei 2014: 1167-1177. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat digugat kembali walaupun dengan subyek berbeda, mengingat ketentuan pada Pasal 1917 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya subyek yang sama dan obyek yang sama yang dapat disebut sebagai *nebis in idem* lalu Mahkamah Agung mengeluarkan *Yurisprudensi* MA.RI tentang *nebis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002 yang bertentangan

dengan Pasal 1917 KUHPdata, kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*.

Berdasarkan uraian mengenai Implementasi Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang digugat kembali dengan sengketa obyek yang sama dan subyek yang berbeda, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim MA mengeluarkan *yurisprudensi* Nomor: 1226K/Pdt/2001 walaupun subyek berbeda tetapi objek sama tetap dikatakan sebagai *Nebis In Idem* yang mana berbeda dengan Pasal 1917 KUHPdata yang mengatakan hanya subyek dan obyek yang sama dapat disebut sebagai *Nebis In Idem* tidak saling bertentangan, justru adanya *yurisprudensi* tersebut semakin menutup celah hukum yang ada pada pasal 1917 KUHPdata tentang apa yang disebut sebagai asas *nebis in idem*, dan juga semakin memperkuat kepastian hukum. Daya ikat *yurisprudensi* terhadap para hakim sangat tinggi, walaupun *yurisprudensi* berada diluar tata urutan peraturan perundang-undangan. Karena berdasarkan daya berlakunya, *yurisprudensi* memiliki daya ikat *concreto* yaitu daya ikatnya hanya berlaku bagi yang berperkara saja Sedangkan Undang-undang memiliki daya ikat *abstarcto* yaitu tidak hanya yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum orang yang tunduk pada kekuasaan undang-undang.

Mairiko Alexander Kotu (2016) *Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Perkara Pidana*, Lex Et Societatis, Vol. 4, No. 2.1, 2016. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna yuridis yang terkandung dalam asas *Nebis in Idem* dan bagaimana penerapan asas *Nebis in*

*Idem* dalam bentuk putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil Penelitian disimpulkan: 1) Ketentuan hukum menguasai atas *Nebis in idem* dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2) KUHP, Bab VIII tentang gugurnya hak menuntut dan menjalankan hukuman. Dalam pasal ini dikatakan suatu dasar hukum yang biasa disebut *Nebis in Idem* yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya dasar *Nebis in Idem*, itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang dan juga menguasai peristiwa yang tertulis telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi. 2) Putusan yang dapat dikategorikan sebagai *Nebis in Idem* adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang dibentuk: a) Putusan bebas (*vrijspraak*), putusan ini terjadi karena terdapat di dalam siding pengadilan dinyatakan tidak tertulis secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum; b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan, kepada terdakwa tersebut, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum; c) Putusan penundaan (*veroordeeling*) putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar (2018) *Asas Nebis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP)*. Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018:23-39. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui kebenaran bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, dan pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan data sekunder sebagai objek analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, namun dalil gugatan antara kedua perkara itu berbeda sehingga tidak melanggar asas *nebis in idem*. Pertimbangan hakim untuk mendasarkan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah asas *similia similibus* dan asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni bahwa tergugat melanggar hak subjektif penggugat.

Sejauh penelusuran yang dilakukan belum ada penelitian tentang judul ini “Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs”. Beberapa kajian di atas tentu memiliki titik persamaan dengan penelitian ini, namun kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya, salah satunya yaitu, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Brebes, studi putusan Nomor Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami



lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya diperoleh melalui penelusuran dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara lengkap dan mendalam mengenai obyek yang diteliti.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim . Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs untuk mencari asas-asas hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengadili gugatan penggugat yang dianggap mengandung asas *nebis in idem* dan dasar hakim untuk mengikuti putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap pada perkara sebelumnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu cara atau metode yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan

---

<sup>13</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.<sup>16</sup> Sumber utama data penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs.

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 15.

<sup>15</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52.

<sup>16</sup> Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang terdapat dalam bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Selain itu digunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, yaitu berupa literatur dan jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdapat dalam Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan

---

<sup>17</sup> Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 181.

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 21

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>19</sup>

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, dilakukan konstruksi data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya data di susun secara kualitatif dan kemudian di uraikan untuk memberi gambaran mengenai asas *nebis in idem* dalam perkara perdata.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan diuraikan teori-teori penunjang mengenai tinjauan tentang asas *nebis in idem*, tinjauan tentang proses

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 251-252.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 255.

pemeriksaan sengketa perdata, tinjauan tentang putusan hakim, dan tinjauan tentang hakim dan yurisprudensi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs dan dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Asas *Nebis In Idem*

##### 1. Pengertian *Nebis In Idem*

*Nebis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.<sup>21</sup> Dasar pemikiran asas ini adalah untuk menjaga martabat pengadilan serta untuk kepastian hukum bagi pihak yang telah mendapatkan putusan.

*Nebis in idem* dapat diartikan tidak atau jangan dua kali yang sama. Menurut kamus hukum *nebis in idem* ialah Asas yang menyatakan bahwa tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah di putus, di periksa dan di putus untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan. Suatu perkara yang sama, tidak boleh di periksa dan di putus lagi untuk kedua kalinya<sup>22</sup>.

*Nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara (BW) yang menyatakan “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.” Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk

---

<sup>21</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 90.

<sup>22</sup> Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2010, hlm. 449.

mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.<sup>23</sup>

Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur, “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”. Sedangkan pada Pasal 76 ayat (2) KUHP menyatakan, putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- 1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
- 2) putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Berdasarkan pasal *a quo* ada dua *adagium* yang terkandung di dalamnya. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya *adagium* ini kemudian dikenal sebagai *nebis in idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Kedua, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censer*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.

---

<sup>23</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 42

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.<sup>24</sup> Yang dimaksud dalam *nebis in idem* di sini termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (*wanprestasi*), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan.

Sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya "*nebis in idem*" dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.<sup>25</sup>

Asas *nebis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah

---

<sup>24</sup> Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 359-360.

<sup>25</sup> Sarwono, *Op Cit*, hlm. 91.



diputus oleh hakim. Asas *nebis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *nebis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

## **2. Syarat Berlakunya *Nebis In Idem* dalam Perkara Perdata**

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya, hal ini sesuai dengan Pasal 1971 KUHPerdata. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dari para pihak yang sama. Persyaratan suatu sengketa yang dikenai asas *nebis in idem* adalah pihak yang digugat harus sama. Sengketa dapat dikatakan mengandung asas *nebis in idem*, apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat-syarat suatu perkara atau sengketa dikatakan mengandung asas *nebis in idem* antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek gugatan sama. Subyek gugatan adalah para pihak dalam sengketa tersebut, yakni, pihak penggugat dan pihak tergugat. Subyek gugatan yang dapat dikenai asas *nebis in idem* adalah apabila dalam sengketa yang terdahulu baik penggugat maupun tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian.
- b. Obyek tuntutan sama. Ada atau tidak adanya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, akan tetapi apakah obyek dalam perkara

tersebut telah mendapatkan status dari Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan alasan yang sama. Obyek gugatan adalah mengenai apa yang menjadi soal atau masalah dari sebuah gugatan terdahulu dan gugatan yang diajukan kemudian. Obyek gugatan dapat dikenai asas *nebis in idem* apabila soal atau masalah gugatan terdahulu dan yang diajukan kemudian adalah sama.

- c. Alasan yang sama. Syarat ketiga untuk adanya asas *nebis in idem* adalah gugatan atau tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah diputus terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sama dengan alasan atau dasar gugatan yang diajukan kemudian<sup>26</sup>

Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa yang sama baik itu mengenai objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya oleh penggugat dan telah di putus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maka pengajuan permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kedua kalinya ke pengadilan negeri yang seperti ini akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa gugatan tidak dapat di kabulkan dengan alasan *nebis in idem*.<sup>27</sup>

### 3. Pengaturan *Nebis In Idem* secara Umum dalam Hukum Indonesia

Sengketa perdata yang mengandung sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama yang diputus oleh pengadilan yang mengandung kekuatan hukum tetap baik mengabulkan

---

<sup>26</sup> Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi)*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007, hlm. 26

<sup>27</sup> Sarwono, *Op Cit*, hlm. 92-93.

ataupun menolak pada keputusan tersebut, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Syarat-syarat di atas harus terpenuhi untuk dapat dikatakan perkara *nebis in idem*. Apabila dalam suatu perkara dengan objek dan materi perkara yang sama akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda hal tersebut tidak termasuk dalam *nebis in idem*. Hal ini karena persoalan tersebut tidak mempunyai unsur *nebis in idem*. Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri menganut prinsip *nebis in idem* sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) yang menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terkait dengan pengujian Undang-Undang dapat juga ditemui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pada asas *nebis in idem* yaitu terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, sedangkan larangan menguji materi muatan yang sama telah diajukan dalam pengaturan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pengujian terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan pada (Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005).

Jadi, seorang yang pernah mengajukan sebuah pengujian materi dalam undang-undang atau oleh pemohon baru dapat mengajukan untuk kedua kalinya terhadap materi yang sama asalkan alasan-alasan yang digunakan untuk menguji norma berbeda dengan yang sebelumnya. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut prinsip bahwa sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima. Perkara tersebut bukan termasuk *nebis in idem* dan dapat digugat kembali untuk yang kedua kalinya.

#### **4. Penerapan *Nebis In Idem* dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Beberapa masalah yang dapat terjadi di dalam lingkungan peradilan, terutama di lingkungan pengadilan umum atau peradilan negeri dan peradilan agama. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan permohonan dan yang kedua adalah masalah gugatan baik permohonan maupun gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon/penggugat atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara permohonan dan gugatan:

- a. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa apabila terjadi suatu konflik harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan.
- b. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
- c. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan *contentiosa* atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *voluntair* atau pengadilan pura-pura.

- d. Hasil suatu gugatan adalah putusan (*vonis*) sedangkan hasil suatu pemohon adalah penetapan (*beschikking*)

Para pihak yang bersengketa dalam beracara di pengadilan bertujuan untuk mendapatkan putusan dari pengadilan dengan harapan agar penyelesaian yang adil atas permasalahan yang disengketakan. Pengadilan merupakan jalan terakhir bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan segala sengketa. Sebelum menempuh jalur hukum ini, para pihak tentu harus mengupayakan perdamaian dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Tugas pokok pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Berdasarkan Pasal 178 HIR ayat (2) bahwa "Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan".

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan sebuah permasalahan berdasarkan hukum, sebagai profesi yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, bangsa, dan negara. Putusan pengadilan seadil-adilnya merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dengan adanya putusan pengadilan tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap sengketa yang sedang dihadapi. Dalam hal ini putusan bukan hanya pernyataan lisan saja, akan tetapi juga pernyataan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim di dalam persidangan.<sup>28</sup> Dalam hal

---

<sup>28</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2002, hlm.202.

putusan tersebut, HIR, khususnya Pasal 178 ayat (3) melarang hakim menjatuhkan putusan atas sengketa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.<sup>29</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus memperhatikan tiga faktor di dalamnya, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan tersebut harus adil dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat. Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

a. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan.

Jadi, putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUHPerdara). Terikatnya para pihak kepada

---

<sup>29</sup> Basuki, Kunthoro, "*Dimensi Hakim Aktif dalam Perspektif Putusan yang Bersifat Menyelesaikan Perkara*", Mimbar Hukum. No. 38/VI/2001, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta, 2001, hlm. 120.

putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif. Arti positif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang (Pasal 1917, 1920 KUHPerdara). Arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum: *nebis in idem* (Pasal 134 Rv) kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan pada asas "*litis finiri oportet*", yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif (Pasal 1917, 1920 KUHPerdara dan 134 Rv).<sup>30</sup>

b. Kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*)

Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang bersengketa, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Putusan

---

<sup>30</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Op Cit*, hlm. 205.

dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.

Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.<sup>31</sup>

c. Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Pada dasarnya tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya. Apabila hal itu terjadi, putusan pengadilan tersebut dapat dinyatakan *nebis in idem*. Dengan adanya putusan pengadilan maka terdapat kepastian hak dan kepastian hukum tentang suatu sengketa tersebut.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 210.



Apabila ada gugatan baru mengenai hal (obyek), pihak-pihak (subyek) dan alasan yang sama, berdasarkan asas *nebis in idem* gugatan tersebut harus ditolak.

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah apa yang ada pada suatu waktu telah diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Apabila suatu sengketa sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, sengketa demikian tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh kekuatan hukum. Apa yang telah diputus hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya. Inilah yang disebut asas *nebis in idem*.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata**

### **1. Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri**

Sengketa perdata merupakan suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Pengertian tersebut di atas, jelaslah sudah bahwa kalimat dari pada “sengketa” itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa di dalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan perkara perdata (permohonan penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 211.

Praktik para pihak bersengketa yang diselesaikan di pengadilan umumnya sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai di luar persidangan, dimana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sehingga pihak yang telah dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.<sup>33</sup>

Pemeriksaan sengketa perdata dapat terjadi apabila muncul suatu permasalahan yang menjadi dasar persengketaan tersebut. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri berawal dari adanya sebuah gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terkait sengketa perdata. Suatu sengketa agar dapat diperiksa dan diputus melalui persidangan di muka pengadilan terlebih dulu harus mengajukan gugatan tersebut. Gugatan disebut sebagai tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>34</sup>

Gugatan merupakan bentuk tuntutan hak dari salah satu pihak yang bertujuan untuk memulihkan hak seseorang tersebut yang telah dirugikan oleh pihak lain.<sup>35</sup> Gugatan atau tuntutan hak akan dikabulkan apabila telah menjalani

---

<sup>33</sup> Sarwono, *Op Cit*, hlm. 7.

<sup>34</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Op Cit*, hlm. 2.

<sup>35</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 15.

suatu proses persidangan, oleh karena itu suatu gugatan yang diajukan harus berdasar atas hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang menuntut haknya tersebut.

Proses pemeriksaan sengketa perdata sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri tidak lepas dari peran hakim. Menurut sistem HIR dan RBg hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari kebenaran yang sesungguhnya atas sengketa yang ditanganinya, tetapi juga harus aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>36</sup> Hakim memeriksa dan memutus sengketa perdata secara adil guna kembalinya hak pihak yang telah dirugikan oleh pihak lain.<sup>37</sup>

Pada proses tanya jawab di muka persidangan, para pihak yang bersengketa bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan sengketa tersebut. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai sengketa yang terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan keyakinan dan kepastian pada hakim mengenai terjadinya sengketa tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 115.

## 2. Tahap-Tahap Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri

Pada tahap-tahap proses pemeriksaan sengketa di pengadilan negeri, penulis membagi dan menguraikannya ke dalam tiga tahap, sebagai berikut:

### a. Tahap-tahap tindakan sebelum proses pemeriksaan di muka persidangan

Pasal 121 HIR merupakan dasar hukum bagi pencatatan sengketa oleh panitera, kemudian pada Pasal 121 ayat (4) HIR mengharuskan membayar biaya sengketa sebelum dicatat dalam register/daftar sengketa. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para pihak disertai materai. Berdasarkan Pasal 182, 183 HIR apabila diminta bantuan pengacara maka harus dikeluarkan biaya pula.

Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri harus ditujukan kepada pengadilan negeri yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus dalam pengadilan tingkat pertama. Menurut hukum acara perdata hal tersebut didasarkan pada dua kewenangan, yaitu :

- 1) Wewenang mutlak (*absolute competentie*), wewenang mutlak dari pengadilan negeri dalam sengketa perdata adalah kekuasaan yang dimilikinya untuk mengadili setiap sengketa perdata, meliputi semua sengketa hak milik dan hak-hak yang muncul karenanya serta hal-hak keperdataan lainnya. Hal ini disebut *attributie van rechtsmacht* yakni pemberian kekuasaan mengadili tentang suatu sengketa.
- 2) Wewenang relatif (*relative competentie*), wewenang relatif menyangkut pembagian kekuasaan hakim. Hal ini disebut *distributie van rechtspraak*

yakni pembagian kekuasaan mengadili sesama pengadilan negeri.<sup>39</sup> Pasal 118 HIR menentukan bahwa :

- a) Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- b) Jika yang menjadi tergugat lebih dari satu orang maka penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat.
- c) Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata. Dalam hal ini gugatan diajukan ke pengadilan negeri dimana penggugat tinggal.
- d) Sedangkan apabila gugatan mengenai benda tetap maka gugatan itu harus diajukan ke pengadilan negeri tempat benda itu berada.<sup>40</sup>

b. Tahap-tahap selama proses persidangan

Setiap penggugat sangat menghendaki gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu dia berkepentingan pula seandainya gugatannya dikabulkan maka dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Untuk menjamin hak penggugat dalam hal gugatannya dimenangkan, maka undang-undang menyediakan upaya hukum yaitu penyitaan (*beslag*) yang merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.

---

<sup>39</sup> Sarwono, *Op Cit*, hlm. 62-63.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 57.

Penyitaan sebagai jaminan (sita jaminan) dapat dilakukan baik terhadap barang milik penggugat sendiri yang ada di tangan orang lain, maupun terhadap milik tergugat. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri ada dua macam, yaitu sita *revendicatoire* dan sita *marital*:

- 1) Sita *revindicatoire* (*revindicatoire beslag*). Berdasarkan Pasal 226 HIR sita *revindicatoire*, yaitu penyitaan terhadap barang tidak tetap milik penggugat yang berada di tangan tergugat, dengan maksud untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang kembali pada penggugat.
- 2) Sita *maritaal* (*maritaal beslag*). Berdasarkan Pasal 823 RV sita *maritaal*, yaitu penyitaan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya untuk melindungi hak pemohon (harta bersama/gono gini) selama pemeriksaan sengketa perceraian berlangsung.

Sita jaminan terhadap barang milik tergugat sendiri ada dua macam, yaitu sita *conserveatoire* dan sita *eksecutorial* :

- 1) Sita *conserveatoire* (*conserveatoire beslag*). Berdasarkan Pasal 227 HIR sita *conserveatoire*, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Sita *conserveatoire* merupakan tindakan persiapan dari tergugat untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dapat menguangkan atau menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.
- 2) Sita *eksecutorial* (*eksecutorial beslag*). Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka sita *conserveatoire* perlu mendapat titel *eksecutorial*. Dengan demikian mengubah sita jaminan ini menjadi sita *eksecutorial*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 326-363.

c. Tahap-tahap pemeriksaan di muka persidangan

Pemeriksaan sengketa di muka persidangan atau sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota. Menurut sistem HIR dan RBg hakim aktif memimpin acara dari awal hingga akhir sidang. Diawali dengan hakim ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum dan segera memulai memeriksa identitas para pihak. Tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1) Acara *verstek* (tanpa hadir tergugat).

*Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan dia dihukum membayar biaya sengketa. Akan tetapi, dia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar lebih dahulu biaya sengketa tersebut (Pasal 124 HIR, 148 RBg).<sup>42</sup>

2) Persidangan di muka sidang pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 381.

beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Bahwa dalam hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, dan Pasal 154 ayat (1) RBg, bila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, hakim ketua berupaya untuk mendamaikan mereka. Upaya damai tidak hanya pada permulaan sidang pertama, melainkan sampai sidang berakhir pun sebelum hakim ketua mengetokkan palu putusannya. Terdapat dua kemungkinan terhadap hasil upaya perdamaian tersebut, yaitu:

- a) Apabila perdamaian di muka sidang dapat tercapai, maka acara berakhir dan majelis hakim membuatkan akta perdamaian (*sertificate of reconsiliation*) dan mempunyai kekuatan berlaku (*force of excecution*) serta dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 ayat (2) HIR, Pasal 154 ayat (2) RBg).
- b) Apabila perdamaian tidak tercapai, maka srat gugatan dbaca dan persidangan dimulai (Pasal 131 ayat (1) HIR).

### 3) Jawaban tergugat

Dalam pemeriksaan sengketa di muka sidang pengadilan negeri, jawaban kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Na mun



yang dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang lebih penting karena tergugat menjadi sasaran penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, bantahan, tangkisan (*exceptie*), dan *referte* (tergugat tidak membantah, tetapi tidak pula membenarkan isigugatan).<sup>43</sup>

#### 4) Gugatan balik

Gugatan balik atau yang biasa disebut dengan gugatan reconvensi diatur dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR yang menyatakan gugatan yang diajukan tergugat sebahai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya dan gugatan reconvensi diajukan tergugat kepada PN pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.<sup>44</sup>

#### 5) Eksepsi

Tangkisan pihak tergugat yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, tetapi tangkisannya hanya mempermasalahkan tentang pengadilan negeri tidak berwenang mengadili karena berdasarkan kompetensi relatif masuk wewenang pengadilan negeri lain.<sup>45</sup>

#### 6) Replik

Jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Viswandro, *Pembuatan Berkas-berkas Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 61.

<sup>44</sup> Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 468.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 418.

<sup>46</sup> Viswandro, *Op Cit*, hlm. 74.

#### 7) Duplik

Jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama dengan replik, duplik inipun dapat diajukan baik secara tulisan maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.<sup>47</sup>

#### 8) Pembuktian

Suatu kegiatan atau proses untuk meyakinkan hakim atas apa yang dituntut, atau apa yang disengketakan agar dalil-dalil yang dikemukakan menjadi jelas dan terang benderang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.<sup>48</sup> Pasal 283 RBg/163 HIR menjelaskan: “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.

### C. Tinjauan tentang Putusan Hakim

#### 1. Pengertian Putusan Hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>48</sup> Asikin, Zainal, *Op Cit*, hlm. 101.

musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukum ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 797.

memberikan putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan putusan provisionil, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan dalam praktik perbedaanya tidaklah penting.<sup>50</sup>

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.<sup>51</sup>

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi "putusan pengadilan" sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Jika kita bertolak pada ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap "putusan hakim". Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh "putusan hakim".

Pandangan doktrin dan rancangan perundang-undangan hukum acara perdata mengenai putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

---

<sup>50</sup> Sarwono, *Op Cit*, hlm. 211.

<sup>51</sup> Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 797.

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa atau sengketa antara para pihak.<sup>52</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>53</sup> Selanjutnya dalam Bab I Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2007 menyatakan bahwa putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan sengketa perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa.<sup>54</sup> Dari batasan sebagaimana penulis formulasikan tersebut, maka dapatlah lebih detail disebutkan pada hakikatnya "putusan hakim" merupakan :

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan sengketa perdata yang terbuka untuk umum. Dalam konteks ini putusan diucapkan oleh hakim karena adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa.

---

<sup>52</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Op Cit*, hlm. 202.

<sup>53</sup> Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 207.

<sup>54</sup> Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 149.

- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya. Hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat dan sah.
- c. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam praktik putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak bersengketa, dikirim kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas sengketa.
- d. Putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa. Pada hakikatnya seorang yang "merasa" dan "dirasa" bahwa haknya telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar sengketa tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau saran penyelesaian sengketa adalah melalui "putusan hakim".

## **2. Jenis-jenis Putusan Hakim**

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provinsi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim.

- a. Dari aspek kehadiran para pihak
  - 1) Putusan gugatan gugur. Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77Rv. Jika penggugat tidak datang pada sidang yang ditentukan, atau

tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu:

- a) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat
  - b) Berbarengan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara.
- 2) Putusan *verstek*. Mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan.
- 3) Putusan *contradictoir*. Putusan *contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat atau salah satu tergugat tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya, secara yuridis hakim menangani perkara tersebut dapat memberikan putusan *contradictoir*. Dalam hal ini terjadi demikian, maka tergugat atau para tergugat tidak diperkenankan mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan negeri, tetapi perlawanannya hanya diperbolehkan diajukan dalam tingkat banding ke pengadilan tinggi (Pasal 127 HIR).<sup>55</sup>

b. Putusan ditinjau dari sifatnya

- 1) Putusan *deklarator*. Putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak

---

<sup>55</sup> Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 873-875.

pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, dan lain-lain.

- 2) Putusan *constitutief*. Putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suamiistri sebagai janda dan duda.
- 3) Putusan *condemnatoir*. Putusan yang memmuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Pada umumnya putusan ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan dipengadilan. Misalnya hukuman untuk membayar ganti rugi, hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang.<sup>56</sup>

c. Putusan ditinjau pada saat penjatuhan

1) Putusan Sela

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 876-878.



tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut.

- a) Putusan *preparatoir*. Putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya putusan yang menolak atau menerima menundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.
- b) Putusan *interlocutoir*. Putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. Misalnya pengambilan sumpah, pemeriksaan para saksi, pemeriksaan saksi ahli, dan lain-lain.
- c) Putusan *insidentil*. Putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- d) Putusan *provisi*. Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. Misalnya putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar di perkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung.<sup>57</sup>

## 2) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa umumnya dapat berupa :

- a) Gugatan dikabulkan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga sebagian. Jadi dalam surat permohonan gugatan dalam praktiknya hakim dalam mengambil keputusan pada dasarnya tetap mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang sedang bersengketa.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 880-884.

- b) Gugatan ditolak. Maksud dari gugatan ditolak disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya (keautentikannya) di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak dan tidak beralasan. Maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.
- c) Gugatan tidak dapat diterima. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvan kelijk verrklaart*) oleh pengadilan dengan alasan bahwa gugatannya tidak beralasan, gugatannya melawan hak, gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.
- d) Tidak berwenang mengadili. Maksud dari tidak berwenang mengadili adalah bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.<sup>58</sup>

#### **D. Hakim dan Yurisprudensi**

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, sehingga tanpa hakim pengadilan tidak layak dikatakan sebagai lembaga peradilan. Bahkan dalam perkembangannya oleh sebagian masyarakat sering diasosiasikan hakim dengan pengadilan. Artinya bahwa hakim selalu identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman identik dengan kebebasan hakim. Demikian pula halnya dengan keputusan pengadilan identik dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan pengadilan sangat

---

<sup>58</sup> Sarwono, *Op Cit*, hlm. 222-224.

ditentukan oleh keberadaan hakim dalam lembaga peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu fungsi hakim yang sangat penting adalah mengembangkan yurisprudensi.

Perkataan yurisprudensi dalam kepustakaan hukum *anglo saxon* mengandung arti yang lebih luas dari perkataan yurisprudensi dalam hukum Eropa Kontinental. Di dalam kepustakaan *anglo saxon*, yurisprudensi selain bermakna hukum (dalam putusan) hakim, juga bermakna filsafat hukum dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam kepustakaan Eropa kontinental dan dalam kepustakaan hukum Indonesia, yang disebut yurisprudensi adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama. Beberapa literatur mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang selalu diikuti oleh hakim lain (sesudahnya) dalam hal memutus sesuatu perkara yang sifatnya sama.

Secara garis besar yurisprudensi (dilihat dari daya ikatnya) bagi hakim lain, dibagi menjadi dua, yaitu yurisprudensi yang bersifat tetap dan yurisprudensi tidak tetap.

1. Yurisprudensi tetap, yurisprudensi dapat dikatakan yurisprudensi tetap, apabila keberadaannya selalu diikuti oleh hakim yang lainnya. Ini berarti, bentuk yurisprudensi ini sudah menjadi kaidah hukum. Contoh dari yurisprudensi tetap ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 47/kr/28 Maret 1957 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar keputusan oleh

Pengadilan Negeri adalah surat dakwaan dan bukan surat tuduhan yang dibuat oleh polisi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Yurisprudensi tidak tetap, putusan hakim dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tidak tetap, apabila tidak selalu diikuti oleh hakim yang lainnya. Sebagai catatan, seringkali putusan-putusan yang dimaksud dalam yurisprudensi tersebut di atas, baik yang bersifat tetap atau yang tidak tetap biasanya sangat tergantung dari hakim MA lebih menguntungkan. Kemungkinan seperti ini disebabkan oleh kenyataan, bahwa masih banyak pihak yang untuk memperoleh keadilan hukum selalu berupaya sampai ke Mahkamah Agung, sehingga putusannya dianggap solid.<sup>59</sup>

Pengembangan yurisprudensi selain menggambarkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai sumber hukum atau inspirasi hukum dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Selain itu yurisprudensi juga dapat dikategorikan sebagai fatwa hakim yang mempunyai integritas keilmuan yang tidak diragukan. Oleh karena itu, yurisprudensi merupakan hasil ijtihad seorang hakim sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Yurisprudensi dalam kategori ini, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas kasus yang diajukan

---

<sup>59</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim (2014) *Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda*. Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XII, Nomor 1, Mei 2014, hlm 1169-1170.

oleh pencari keadilan. Kaitannya dengan pengembangan yurisprudensi, hakim mempunyai peranan yang penting dan strategis.

Tentunya hakim dalam hal ini adalah hakim dalam lembaga peradilan secara fungsional. Dikatakan demikian karena hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berhadapan dengan kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tidak semua mempunyai ketentuan hukum secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi adakalanya bahkan di antara kasuskasus yang diajukan pada hakim banyak yang tidak mempunyai dasar hukum secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang. Terhadap kasus-kasus yang demikian inilah hakim mempunyai tanggung jawab dan dituntut untuk berijtihad sesuai dengan ilmunya. Ijtihad atau fatwa hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus yang tidak mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang itulah yang kemudian disebut dengan istilah yurisprudensi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi hakim yang penting adalah mengembangkan yurisprudensi. Oleh karena itu, yang paling penting bagi hakim dalam mengembangkan yurisprudensi adalah kemampuan hakim itu sendiri. Dalam artian bahwa hakim hendaknya mempunyai integritas keilmuan yang diandalkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan yurisprudensi.

Ada beberapa alasan para hakim mengikuti keputusan hakim lain, dalam memutuskan perkara yang sifatnya sama. Alasan pertama adalah alasan psikologi, yang kedua adalah alasan bersifat praktis dan ketiga adalah persesuaian pendapat.

1. Alasan psikologis. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-

pihak yang berkompeten di dalamnya. Dalam kenyataannya, keputusan hakim juga dapat dan mampu menyusun pendapat umum (Publik Opini) bahwa yang diputuskan adalah benar adanya. Sehingga semua pihak yang berkecimpung dalam masalah hukum tertentu yang sejenis dengan perkara yang serupa dengan perkara yang telah diputuskan oleh hakim tadi secara tidak langsung dirinya merasa terikat di dalamnya. Termasuk di dalamnya para hakim itu sendiri. Lebih-lebih, hakim yang secara organisasi berada dalam stuktur di bawah hakim yang memutuskan perkara tadi (misalnya putusan hakim Mahkamah Agung). Keputusan hakim Mahkamah Agung apabila tidak diikuti oleh hakim yang berada dalam tingkat yang lebih rendah, akan menimbulkan beban psikologis yang tidak menguntungkan bagi hakim yang bersangkutan. Meskipun tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan agar ia harus selalu berpedoman pada keputusan hakim yang ada di atasnya. Dalam hal keputusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung, hal yang demikian dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang tidak langsung kepada para hakim yang berada di bawahnya.

2. Alasan praktis. Kesan yang akan timbul apabila seorang hakim yang memutus perkara yang jenisnya sama yang tidak sesuai dengan keputusan hakim yang diputuskan oleh hakim yang berada di atasnya adalah seakan-akan ia memutuskan tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada. Alangkah janggalnya, apabila suatu putusan hakim yang lebih rendah secara administrasi akan bertentangan dengan keputusan hakim yang secara administrasi sementara jenis dan sifat dari jenis perkara tersebut adalah sama. Sebab, apabila seseorang terlibat dalam sebuah perkara tidak puas, maka tentunya ia

akan mengajukan banding kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Yang menyebabkan keputusan hakim terdahulu akan dibatalkan.

3. Persesuaian Pendapat. Persesuaian pendapat ini bukan hanya menyangkut bagi para hakim itu sendiri melainkan untuk rasa sekarang semua pihak (para praktisi dan akademis) telah menganggap bahwa apabila sebuah kasus ditangani tanpa berdasarkan yurisprudensi (keputusan hakim yang telah ada), akan menimbulkan reaksi yang tidak sedikit, ini berarti bahwa pada dasarnya semua pihak mengingkari adanya persesuaian pendapat tentang yurisprudensi sebagai sumber hukum.<sup>60</sup>

Di samping beberapa alasan yang menyebabkan yurisprudensi itu diikuti oleh hakim yang lainnya, yurisprudensi dapat berperan untuk menciptakan standar hukum dan pembinaan landasan hukum yang sejenis.

1. Menciptakan standar hukum. Dengan adanya yurisprudensi ini diharapkan akan menciptakan standar hukum yang benar-benar mengandung unsur-unsur aktual, dalam kasus-kasus tertentu yang terjadi pada sebuah Negara (peradilan) pada sebuah Negara.
2. Membina landasan hukum yang sama. Keseragaman hukum yang sama pada suatu yurisprudensi yang akan mampu menciptakan standar hukum yang sama, dengan sendirinya akan berperan dan berfungsi membina dan mewujudkan landasan hukum yang sama. Apabila terjadi persamaan-persamaan persepsi yang sama terhadap sebuah kasus yang sama, baik oleh praktisi dan akademisi dan para pencari keadilan dan hakim yang telah menjadikan yurisprudensi sebagai landasannya, yang demikian itu akan sangat berpengaruh pada

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 1171.



pembinaan hukum yang sama dalam hal mengadili dan memeriksa kasus yang sifat dan jenisnya berbeda. dengan adanya landasan hukum yang sama yang secara tidak langsung juga dibina bersama, keefektivitasan dalam menangani sebuah kasus akan tercapai. Ini merupakan salah satu bentuk pengisian hukum oleh hakim.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Penyelesaian Perkara Perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs

Asas *nebis in idem* atau dikenal juga dengan asas *litis finiri oportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1920 KUHPerdata dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.

Penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata mengacu pada Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya". Bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya *nebis in idem*. Asas *nebis in idem* yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat. Konsekuensinya, hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya.

Asas *nebis in idem* dapat digunakan tergugat dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.

Penerapan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.

Dari dasar hukum tersebut maka menurut penafsiran peneliti dapat ditarik beberapa hal, yaitu:

- a. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh kekuatan yang mutlak. Dengan demikian, muncullah kewajiban bagi tiap-tiap pihak yang menurut putusan tersebut dihukum berdasarkan putusan hukum atau terlibat dalam isi putusan hakim.
- b. Putusan tersebut memiliki kekuatan mutlak tidak lebih daripada sekedar mengenai soal putusannya. Sehingga kekuatan mutlak tersebut terbatas pada substansi putusan hakim. Tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang telah diputuskan oleh hakim atas perkara tersebut.
- c. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mutlak untuk dilaksanakan. Sehingga terhadap hal yang telah harus dilaksanakan tersebut, tidak bisa untuk tidak dilakukan. Putusan tersebut harus dilaksanakan.

Sementara dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPdata disebutkan bahwa, "Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula". Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan, dan tidak bisa untuk tidak dilaksanakan. Tidak boleh diajukan gugatan baru yang mempersoalkan substansi yang sama

sebagaimana telah diputus dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Gugatan yang mempersoalkan persoalan yang sama dengan substansi yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap itulah yang dinamakan *nebis in idem*. *Nebis in idem* dalam istilah lain disebut juga dengan istilah *exceptio res judicata*, atau ada pula yang menyebut dengan istilah *exceptie van gewijsde zaak*. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asas *nebis in idem* antara lain sebagai berikut :

- a. Objeknya Sama
- b. Alasannya Sama
- c. Subjeknya Sama
- d. Pengadilannya Sama

Selain itu dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Perlu diketahui bersama, tidak semua pengadilan mengandung asas *nebis in idem*, putusan pengadilan yang mengandung *nebis in idem* adalah putusan positif sedangkan peraturan negatif tidak melekat asas *Nebis In Idem* seperti: gugatan cacat formil, gugatan prematur, voluntair contentiosa yang bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus. Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, yang dalam surat

edaran tersebut ketua MA pada waktu itu menghimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik dan sangat berhati-hati demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Hal ini berarti, suatu perkara yang disebut *nebis in idem* tidak semata-mata mempunyai subjek dan objek perkara yang sama antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama dan dalam hubungan yang sama sebagaimana telah pernah digugat dalam gugatan lain. Perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs asas *nebis in idem* digunakan dalam eksepsi Tergugat. Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem (Exceptio Res Judicata)*. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* apabila dicermati dari materi/obyek sengketa, posita maupun petitumnya ternyata sama dengan perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/P.N. Bbs, tanggal 08 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena perkara *a quo*, adalah sama dan sudah pernah di putus dalam perkara No. 22/Pdt.G/2017/P.N. Bbs, tgl 08 Februari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum tidak dapat lagi diajukan gugatan baru (vide Ps. 1917 KUH Perdata - *Azas Res Judicata/Nebis In Idem*).

Untuk dapat mengetahui apakah benar penerapan asas *nebis in idem* Tergugat dalam eksepsinya, yaitu Putusan No. 22/Pdt.G/2017/P.N. Bbs merupakan tuntutan yang sama dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs yang sudah pernah diputus oleh hakim sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus dilihat apakah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama, dan pihak

pihak yang berperkara tersebut berperkara dalam hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya.

Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau dalil gugatan yang sama dan mempersoalkan objek perkara yang sama. Gugatan perdata merupakan tuntutan hak yang diajukan seseorang atau beberapa orang yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan. Adanya perselisihan menjadi syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan dan adanya perselisihan/konflik menjadi syarat mutlak adanya gugatan.<sup>61</sup> Jadi jelas bahwa dalil gugatan haruslah berisi adanya konflik dalam arti apa yang menjadi dasar terjadinya konflik (*fundamentum petendi*) atau posita (peristiwa yang terjadi).

*Fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van delis*) yang memuat tentang adanya hubungan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara dan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan kata lain *fundamentum petendi* atau *posita* merupakan uraian jelas mengenai hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum dari pengajuan gugatan atau dasar fakta diajukannya gugatan. Praktik peradilan, *fundamentum petendi* atau *posita* harus memuat objek perkara, yaitu hal yang menjadi pokok sengketa. Secara umum, objek sengketa berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak tetapi dapat juga berupa prestasi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Samosir, D., *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 52.

<sup>62</sup> Butarbutar, E. N., *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KIHPerdata dan Perkembangannya*. Bandung: Refika, 2012, hlm. 13.

Pada perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs, bukti surat berupa amar Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 22/Pdt.G/2017/ PN.Bbs yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), dimana setelah diteliti secara seksama dan menyeluruh putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bbs tersebut adalah mengenai status kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *in casu* atas nama Soedarmo Bin Soemarsono, yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Kembang Baru Brebes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2084, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 575 tanggal 14 Juli 1981 dengan luas 160 M<sup>2</sup> yang terletak di Keluarahan Brebes, Kecamatan Brebes, kabupaten Brebes dengan batas-batas:
  - Utara : berbatasan dengan Jalan Setia Budi;
  - Timur : berbatasan dengan milik Nurmiyati;
  - Selatan : berbatasan dengan milik Koyat;
  - Barat : berbatasan dengan milik Soegaryo.
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 dan telah diubah menjadi Sertifikat HGB Nomor 22, Surat Ukur Nomor 401 tanggal 1 Agustus 1981 dengan luas 1170 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan Muidah;
  - Timur : berbatasan dengan Nisah;
  - Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Jalan dari Cirebon ke Tegal;
  - Barat : berbatasan dengan Salamun;

Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa tersebut diatas dibeli oleh Alm. Soedarmo Bin Soemarsono masing-masing dari Tn. Suharno dan Tn. Edi Tri Kananiwati sesuai SHM No. 2084 seluas 160 M2 pada tahun 1986 dan pembelian dari Ny. Muidah dan Tn. Paryato sesuai SHM Nomor 136 seluas 1170 M2 pada tahun 1987, yang mana kedua obyek tanah tersebut atas nama Alm. Soedarmo dan Soemarsono.

Mencermati dan mempertimbangkan bukti surat tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Patjah Ryanasari W, SH., dimana dalam Akta Pernyataan tersebut telah disebutkan bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas dibeli oleh Soedarmo Bin Soemarsono yang kedudukannya sebagai Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes dengan menggunakan uang PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena Para Penggugat selaku Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan wewenangnya menuntut kepada Para ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono untuk menandatangani peralihan hak atas kedua bidang tanah diatas sesuai SHM Nomor 2048 dan Nomor 136 yang telah diubah menjadi HGB Nomor 22 dari atas nama Soedarmo menjadi atas nama PRIMKOPTI Kabupaten Brebes. Agar peralihan kedua bidang tanah sesuai SHM Nomor 2048 dan SHM Nomor 136 atas nama Alm Soedarmo Bin Soemarsono dapat dilakukan, kemudian Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes memberikan uang tali asih kepada Para Ahli Waris Soedarmo Bin Soemarsono dengan total pemberiannya sejumlah Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).



Berdasarkan uraian diatas cukuplah jelas bahwa alasan Para Penggugat melakukan tuntutan hukum terhadap Tergugat adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah sesuai SHM No. 2048 dan SHM No. 136 atas nama Alm. Soedarmo Bin Soemarsono, sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara *in casu* telah indentik dengan perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bbs yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*), maka terhadap obyek sengketa tersebut telah memiliki status hukum yang pasti.

Penerapan asas *nebis in idem* dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bbs diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun dalam pengajuan perkara pertama terdapat perbedaan Tergugat, tetapi dalam pengajuan objeknya tetap sama. Pengajuan gugatan kedua kalinya menjadi Tergugat dengan ahli waris lainnya yang pada hakikatnya sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono. Jadi meskipun demikian putusan tersebut tetap dikatakan *nebis in idem* sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/1973 menyatakan bahwa “ada atau tidaknya Azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”. Jadi dengan demikian terhadap perkara *in casu* telah mengandung *azas nebis in idem*.

#### **B. Dasar Hukum Hakim dalam Menerapkan Asas *Nebis In Idem* dalam Putusannya pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs**

*Nebis in idem* dalam penelitian ini adalah eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah pernah diputus dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum

yang tetap. Hal yang perlu dititikberatkan dalam definisi tersebut adalah “perkara yang sama”. Perkara yang bagaimana yang dimaksud sebagai perkara yang sama yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan *nebis in idem*.

Ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asas *nebis in idem* dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs antara lain sebagai berikut :

- a. Objek yang sama. Pada pengajuan gugatan pertama pada putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN. Bbs dan pengajuan gugatan selanjutnya pada perkara putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs mempunyai objek yang sama yaitu mempersoalkan status kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *in casu* atas nama Soedarmo Bin Soemarsono, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Kembang Baru Brebes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2084, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 575 tanggal 14 Juli 1981 dengan luas 160 M<sup>2</sup> dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 dan telah diubah menjadi Sertifikat HGB Nomor 22, Surat Ukur Nomor 401 tanggal 1 Agustus 1981 dengan luas 1170 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, kabupaten Brebes.

- b. Subjek yang sama. Pada perkara pertama terdapat 2 (dua) tergugat, dan pada perkara selanjutnya hanya terdapat 1 (satu) tergugat, tergugat dalam pengajuan gugatan kedua pada hakikatnya sama yaitu sama-sama ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono, namun dalam pengajuan gugatan kedua mengambil nama ahli waris lainnya.
- c. Gugatan yang sama. Gugatan yang diajukan penggugat pertama kali dan gugatan yang diajukan penggugat kedua kalinya adalah identik atau dapat dikatakan sama. Dihubungkan dengan bukti surat berupa Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Patjah Rynasari W, SH., dimana dalam Akta Pernyataan tersebut telah disebutkan bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas dibeli oleh Soedarmo Bin Soemarsono yang kedudukannya sebagai Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes dengan menggunakan uang PRIMKOPTI Kabupaten Brebes, sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena Para Penggugat selaku Pengurus PRIMKOPTI Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan wewenangnya menuntut kepada Para ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono untuk menandatangani peralihan hak atas kedua bidang tanah diatas sesuai SHM Nomor 2048 dan Nomor 136 yang telah diubah menjadi HGB Nomor 22 dari atas nama Soedarmo menjadi atas nama PRIMKOPTI Kabupaten Brebes. Agar peralihan kedua bidang tanah sesuai SHM Nomor 2048 dan SHM Nomor 136 atas nama Alm Soedarmo Bin Soemarsono dapat dilakukan.
- d. Pengadilan yang sama. Pada pengajuan gugatan pertama dan pengajuan gugatan kedua sama-sama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes.

Mengacu pada peraturan undang-undang tentang penerapan asas *nebis in idem* terhadap perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs, berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka dapat diuraikan bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara tersebut sudah benar diterapkan, yaitu didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdata. Namun dalam perkara ini, ada hal yang menjadi poin penting dalam hal pengajuan tergugat, yang pada awalnya terdapat 2 (dua) tergugat, dan pada perkara selanjutnya hanya terdapat 1 (satu) tergugat, tergugat dalam pengajuan gugatan kedua pada hakikatnya sama yaitu sama-sama ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono.

Dasar penerapan asas *nebis in idem* yaitu pengajuan gugatan pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun hanya terdapat I (satu) tergugat yang berbeda dengan pengajuan sebelumnya namun pada hakikatnya tergugat adalah sama-sama ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono. Meskipun dalam pengajuan perkara pertama terdapat perbedaan Tergugat, tetapi dalam pengajuan objeknya tetap sama. Selain berdasar pada Pasal 1917 KUHPerdata, hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara yang dituntut Para Penggugat telah mengandung asas *nebis in idem*, juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/ 1973 menyatakan bahwa “ada atau tidaknya Azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”. Jadi dengan demikian terhadap perkara *in casu* telah mengandung asas *nebis in idem*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada putusan nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs yaitu Pasal 1917 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/ 1973. Jadi *nebis in idem* menurut penulis dapat dimaknai sebagai suatu esensi pokok perkara, dimana melibatkan para pihak yang sama dengan objek sengketa yang sama yang ternyata telah diberi status hukum lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tidak dapat digugat ulang dalam register perkara terpisah guna menghindari tumpang tindih antar putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dalam praktik peradilan yang baik dan sehat.

Rahasia dalam praktik peradilan yang bahkan tidak banyak diketahui oleh para litigator berpengalaman sekalipun dalam bidang gugat-menggugat. Kuncinya adalah merupuskan “petium” (pokok permintaan dalam gugatan) yang berlainan dengan gugatan semula, maka gugatan dapat diajukan ulang terhadap putusan atas gugatan dengan objek, subjek, dan pokok perkara yang sama.

Perkara pada putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/P.N. Bbs, tidak diketahui oleh Penggugat, sekalipun gugatannya dimenangkan dan pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang “kalah”, sertifikat hak atas tanah atas nama Soedarmo Bin Soemarsono sulit dilakukan eksekusi lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat dalam gugatan semula yang telah *inkracht* telah lalai mengikutsertakan pihak ketiga atau pihak-pihak yang ikut berkepentingan dalam proses peralihan hak atas tanah yaitu semua ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono sehingga tidak turut digugat, karena pihak Penggugat

tidak mengetahui ada pihak-pihak ahli waris yang juga tidak mau menandatangani peralihan hak atas kedua bidang tanah diatas sesuai SHM Nomor 2048 dan Nomor 136 yang telah diubah menjadi HGB Nomor 22 dari atas nama Soedarmo menjadi atas nama Primkopti Kabupaten Brebes.

Kondisi tersebut mengakibatkan ketika Penggugat hendak mengeksekusi putusan yang berstatus berkekuatan hukum tetap, kedua bidang tanah/bangunan yang akan dibaliknamakan tersebut bukan merupakan harta waris dari almarhum Soedarmo Bin Soemarsono yang dapat jatuh kepada ahli warisnya tetapi secara sah ke dua bidang tanah/bangunan tersebut milik Para Penggugat/ Primkopti sehingga dengan pendirian Tergugat yang demikian proses balik nama tersebut terhenti sampai sekarang apalagi Ketua Pengurus yang dahulu yang bernama Bapak Fanani sudah meninggal dunia maka bagi Pengurus yang sekarang (Para Penggugat) untuk pengurusan balik nama/peralihan hak tersebut tetap akan dilanjutkan karena merupakan salah satu program Koperasi dimana waktu sebelumnya Tergugat juga sudah pernah menerima uang kompensasi dari Para Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tetapi ternyata tidak mau meneruskan tanda tangan pada ke dua akta jual beli seperti saudara-saudaranya yang lain.

Jadi upaya hukum yang dilakukan pihak Penggugat kemudian dalam mengajukan “gugat ulang”, dalam register perkara “gugatan” perdata terhadap putusan perkara “gugatan” yang sebelumnya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Perlu diingat, dalam “gugatan” baru ulangan tersebut tidak menggunakan petitum yang sama dengan petitum gugatan semula, namun membuat rumusan petitum baru dengan tujuan agar segala proses peralihan hak

atas kedua bidang tanah diatas sesuai SHM Nomor 2048 dan Nomor 136 yang telah diubah menjadi HGB Nomor 22 dari atas nama Soedarmo menjadi atas nama Primkopti Kabupaten Brebes dapat dilanjutkan. Petitum yang berlainan sekalipun berwujud “gugatan ulang”, tidak melahirkan putusan *nebis in idem* oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus “gugatan ulang”.

Asas *nebis in idem* tidaklah selalu menjadi sandera yang demikian ditabukan dan sedemikian menakutkan sepanjang pokok tuntutan dan gugatan dibuat/dirumuskan berlainan, sekalipun atas pokok perkara yang sama, subjek hukum yang sama, dan objek sengketa yang sama. Secara harfiah, sebuah gugatan ketika diputus, dibatasi oleh keberlakuan putusan yang bersifat “*non ultra-petitum*” yang bermakna hakim tidak dapat mengabulkan melebihi apa yang diminta dalam surat gugatan, sehingga mengajukan “gugatan ulang” dengan *petitum* yang berlainan dianalogikan sebagai satu kesatuan dengan *petitum* dalam gugatan semula untuk dapat diperiksa dan diputus di kemudian hari.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs mengacu pada peraturan undang-undang, berdasarkan hasil penelitian maka dapat diuraikan bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara tersebut sudah benar diterapkan, yaitu didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdara. Namun dalam perkara ini, ada hal yang menjadi poin penting dalam hal pengajuan tergugat, yang pada awalnya terdapat 2 (dua) tergugat, dan pada perkara selanjutnya hanya terdapat 1 (satu) tergugat, tergugat dalam pengajuan gugatan kedua pada hakikatnya sama yaitu sama-sama ahli waris Soedarmo Bin Soemarsono.
2. Dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam putusannya pada putusan nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs yaitu Pasal 1917 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/ 1973. Jadi *nebis in idem* menurut penulis dapat dimaknai sebagai suatu esensi pokok perkara, dimana melibatkan para pihak yang sama dengan objek sengketa yang sama yang ternyata telah diberi status hukum lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tidak dapat digugat ulang dalam register perkara terpisah guna menghindari tumpang tindih antar putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dalam praktik peradilan yang baik dan sehat.



## B. Saran

1. Untuk menghindari adanya pemrosesan suatu perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta untuk menghindari kerugian bagi tergugat diharapkan agar Majelis Hakim dalam memproses suatu perkara memahami asas *nebis in idem* dalam perkara perdata agar tidak memproses perkara yang sama untuk kedua kalinya.
2. Pertimbangan asas *nebis in idem* terhadap sengketa perdata hendaknya didasarkan atas hukum atau peraturan dalam beracara, melandasi berbagai pertimbangan dan putusan dengan keadilan, selain berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut hakim harus mendasarkan pada ketentuan teori mengenai obyek sengketa khususnya, sehingga unsur-unsur subyek, alasan gugatan yang sama dapat dihindari sehingga dapat menghindari adanya putusan yang berbeda.
3. Diharapkan bagi Advokat agar lebih memahami penerapan asas *nebis in idem* sesuai dengan esensinya, sehingga tidak ceroboh mengajukan gugatan yang sesungguhnya telah mengandung asas *nebis in idem*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Butarbutar, E. N., *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistemika KIHPerdata dan Perkembangannya*. Bandung: Refika, 2012.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi)*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2010.
- Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Samosir, D., *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Subekti, *Hukum Acara perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2009.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Takwin, Bagus, *Psikologi Naratif Membaca Manusia Sebagai Kisah*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Viswandro, *Pembuatan Berkas-berkas Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

#### **Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/ 1973.
- Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bbs.
- Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Bbs

#### **Jurnal, Makalah, Internet:**

- Basuki, Kunthoro, "*Dimensi Hakim Aktif dalam Perspektif Putusan yang Bersifat Menyelesaikan Perkara*", *Mimbar Hukum*. No. 38/VI/2001, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta, 2001.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, *Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda*. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XII, Nomor 1, Mei 2014.
- Kotu, Mairiko Alexander, *Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Perkara Pidana*, *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2.1, 2016
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Asas Nebis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP)*. *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018.